

DEVELOPMENT OF 3 IN 1 TRAINING PROGRAM FOR MAKING HANDMADE BATIK IN PADANG INDUSTRIAL TRAINING CENTER

Ruva Nurfauzia^{1,2}, Alim Harun Pamungkas¹

¹Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang

²nurfauziaruva@gmail.com

ABSTRACT

This research is written based on training program 3 in 1 making handmade batik that aims to increase community skills, life skills, and create jobs in the field of embroidery and fashion. With the 3 in 1 training program for making handmade batik, the community can be creative and can distribute their potential. This study aims to illustrate how the development of a 3 in 1 training program for making batik in the Padang Industrial Training Center. The development of this program start from the planning process first, the implementation process and the program evaluation process. This research is qualitative approach with the case study method. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentaries. From the results of the study found that the development process starts from the planning stage which includes, 1) goal setting; 2) preparation of training programs. The implementation phase includes, 1) distribution of participants' learning equipment; 2) training methods used; 3) training atmosphere; 4) and implementation of competency tests. The evaluation phase includes the initial evaluation and final evaluation stages.

Keywords: Program, Development, Training, Handmade Batik

PENDAHULUAN

Pendidikan nonformal ialah salah satu bagian dari sistem pendidikan nasional yang mempunyai fungsi untuk meningkatkan sumber daya manusia secara optimal. Yaitu sumber daya manusia yang belum memperoleh pendidikan formal. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam UU No. 20 Th 2003 tentang Sisdiknas Pasal 26 Ayat 1 bahwasanya pendidikan nonformal dilaksanakan untuk masyarakat yang membutuhkan pelayanan pendidikan dengan fungsi menggantikan, menambah, ataupun melengkapi pendidikan formal demi mencapai dan mendukung pendidikan sepanjang hayat (Presiden Republik Indonesia, 2003).

Salah satu bentuk pendidikan nonformal yang bisa memberi suatu bekal terhadap terciptanya kualitas manusia ialah pelatihan (*training*). Pelatihan ialah seluruh aktivitas yang disusun guna meningkatkan potensi masyarakat pada suatu pekerjaan (Pamungkas, 2014). Selain itu pelatihan merupakan salah satu bagian dari pengembangan SDM bermutu. Pelatihan juga merupakan media dalam memenuhi pengetahuan sebagai bentuk dari menghadapi setiap perubahan yang ada (Pamungkas, 2019b).

Balai Diklat Industri Padang merupakan bagian pendidikan nonformal yang mengadakan pelatihan. Balai Diklat Industri Padang merupakan balai diklat yang bergerak pada sektor bordir dan fesyen yang berada di bawah naungan Kementerian Perindustrian Indonesia. Sehubungan dengan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 Ayat 1 mengenai organisasi dan aturan kerja Balai Diklat Industri yang memiliki kewajiban dalam melangsungkan diklat bagi manusia Industri (Presiden Republik Indonesia, 2003). Balai Diklat Industri Padang sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian memiliki kewajiban dasar dan fungsi pada bidang pembinaan dan peningkatan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yaitu memfokuskan pelatihan di bidang bordir dan *fesyen*.

Berdasarkan pengamatan peneliti pada tanggal 20 Mei 2019, tentang pengembangan program Diklat 3 in 1 Pembuatan Batik Tulis di Balai Diklat Industri Padang. Kegiatan ini memiliki beberapa keunikan, yaitu: *Pertama*, batik tulis merupakan hasil dari budaya bangsa Indonesia yang masih dilestarikan oleh Balai Diklat Industri Padang. Balai Diklat Industri Padang melaksanakan diklat ialah kebanyakan dalam bentuk pelestarian budaya, seperti batik tulis, batik cap, menenun, dan lainnya.

Kedua, alat yang digunakan masih menggunakan alat tradisional dan belum menggunakan alat modern. Alat modern yang dimaksudkan yaitu alat yang sudah mengalami proses pembaharuan. Namun, pada Diklat 3 in 1 Pembuatan Batik Tulis ini jika dilihat dari (1) kompor: masih menggunakan kompor minyak (2) gawangan: masih menggunakan kayu, bukan yang bersifat tahan lama. Hal ini terjadi karena pada Diklat 3 in 1 Pembuatan Batik Tulis sengaja tidak menggunakan peralatan modern, untuk saat ini peralatan batik tulis modern sudah ada, tetapi Balai Diklat Industri Padang tidak menggunakannya. Peralatan yang digunakan memang masih menggunakan peralatan sederhana. Hal ini juga terlihat dari beberapa peralatan diklat 3 in 1 yang selain Diklat 3 in 1 Pembuatan Batik Tulis, yang mana menggunakan mesin berkecepatan tinggi dan menggunakan mesin-mesin besar, serta kebanyakan peralatan menggunakan mesin-mesin yang sangat bagus kualitasnya. Berbeda dengan bahan dan alat yang digunakan pada Diklat 3 in 1 Pembuatan Batik Tulis ini, masih menggunakan peralatan yang biasa dipakai oleh pembatik.

Ketiga, dilihat dari peminat, Diklat 3 in 1 Pembuatan Batik Tulis merupakan diklat yang paling banyak diminati setiap tahunnya, terlihat dari jumlah peserta diklat dari keseluruhan diklat yang dilaksanakan. Hal tersebut terjadi karena, banyaknya permintaan dari berbagai daerah yang bekerjasama dengan Balai Diklat Industri Padang untuk mengikuti Diklat 3 in 1 Pembuatan Batik Tulis. Tidak hanya itu, terdapat daerah yang mempunyai khas batik di daerahnya dan kemudian ingin memuculkannya lagi, dan menggunakan Balai Diklat Industri Padang sebagai wadah dalam pelatihan. *Keempat*, pelaksanaan pelatihan dilakukan tidak hanya di Balai Diklat Industri Padang, tetapi dilaksanakan di luar lembaga. Berbeda dengan diklat lain yang dilaksanakan hanya di Balai Diklat Industri Padang.

Didasarkan pada hasil observasi yang peneliti lakukan, diperoleh bahwasanya pelaksanaan Diklat 3 in 1 Pembuatan Batik Tulis merupakan diklat yang paling banyak permintaan. Keunikan-keunikan yang terdapat pada Diklat 3 in 1 Pembuatan Batik Tulis di Balai Diklat Industri Padang ini merupakan bentuk kegiatan pemberdayaan Sumber Daya Manusia yang diarahkan kepada masyarakat yang membutuhkan pelatihan. Kegiatan diklat merupakan tipe program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) institusional. Sehingga dari beberapa hal tersebut mengakibatkan peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian sesuai latar dan situs ini, yaitu Bagaimana Pengembangan Program Diklat 3 in 1 Pembuatan Batik Tulis di Balai Diklat Industri Padang.

METODE

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif menggunakan metode studi kasus. Moleong (2013) menjelaskan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang bertujuan agar menguasai dan menginterpretasikan fenomena atau kejadian mengenai apa saja yang dialami oleh subyek penelitian misalnya sikap, tindakan, perilaku, budaya dan lain sebagainya secara holistik, dengan cara menggambarkan dalam bentuk kata-kata tertulis, lisan, serta bahasa dari orang-orang dan tindakan yang bisa diamati dengan menggunakan metode alamiah. Penelitian ini dilaksanakan di Balai Diklat Industri Padang, peneliti melakukan penelitian tentang Pengembangan Program Diklat 3 in 1 Pembuatan Batik Tulis di Balai Diklat Industri Padang.

Instrumen atau alat penelitian pada penelitian kualitatif ini yaitu peneliti sendiri. Sesuai dengan pendapat Prastowo (2016) instrumen penelitian pada metode penelitian kualitatif berbeda dengan metode penelitian kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, peneliti dapat menjadi instrumen utama dengan instrumen tambahannya yaitu kamera, buku catatan, *tape recorder*, dan lain sebagainya. Posisi peneliti sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pelapor.

Menurut Loffland & Loffland dalam Moleong, (2013) menjelaskan sumber data utama dalam penelitian kualitatif terfokus kepada data tentang perilaku manusia yang tergambar dalam kata-kata dan tingkah lakunya, khususnya tingkah laku yang relevan dengan tujuan penelitian. Sumber data utamanya adalah subyek penelitian yang dapat diamati dan diwawancarai. Subyek penelitian yang peneliti ambil adalah semua pihak yang terlibat pada Diklat 3 in 1 Pembuatan Batik Tulis, seperti kepala penyelenggara, kepala pengembangan, peserta pelatihan, instruktur, widyaiswara dan pegawai yang bersangkutan pada pelatihan di Balai Diklat Industri Padang. Informan penelitian (*key informan*) ialah seluruh orang yang berhubungan dengan kegiatan pelatihan yaitu kepala seksi penyelenggara, kepala seksi pengembangan, panitia penyelenggara, instruktur, widyaiswara dan pegawai yang bersangkutan pada Diklat 3 in 1 Pembuatan Batik Tulis di Balai Diklat Industri Padang. Sedangkan yang menjadi responden adalah individu atau kelompok yang dapat memberikan keterangan tentang penelitian yang sedang dilaksanakan, yaitu Pegawai Seksi Penyelenggara dan Pegawai Seksi Pengembangan Diklat 3 in 1 Pembuatan Batik Tulis di Balai Diklat Industri Padang.

Teknik Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi (pengamatan), dan dokumentasi. Analisis data kualitatif dilaksanakan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data. Menurut Miles & Huberman dalam Prastowo (2016) menjelaskan mengenai komponen dalam melakukan teknik analisis data, yaitu: Reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Moleong, (2013) menyampaikan teknik pemeriksaan keabsahan data terdiri dari: (1) perpanjangan pengamatan; (2) ketekunan atau keajegan pengamatan; (3) Triangulasi; (4) pengecekan sejawat; (5) kecukupan referensial; (6) kajian kasus negatif; (7) pengecekan anggota; (8) uraian rinci; (9) audit kebergan tungan; (10) audit kepastian. Sedangkan dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perencanaan dikatakan oleh Basri (2015) ialah proses dalam menyusun segala bentuk keputusan yang akan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan sesuatu di masa yang akan datang guna untuk mengapai tujuan yang ditetapkan. Perencanaan bisa dikatakan juga sebagai bentuk tindakan rasional hal ini dikarenakan perencanaan ialah sebagai proses intelektual dalam merumuskan tindakan yang akan dilakukan secara sadar dan dijadikan sebagai patokan dalam mencapai sesuatu di masa mendatang. Perencanaan suatu pengembangan program dilakukan oleh penyelenggara diklat dari Balai Diklat Industri Padang, perencanaan di sini juga merupakan proses awal pelaksanaan pelatihan. Sebelum kegiatan diklat dilakukan penyelenggara melakukan analisis terhadap suatu rencana diklat.

Penentuan Sasaran

Sosialisasi

Sosialisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ialah pemeriksaan yang mencakup lingkungan sosial dan budaya, interaksi dan tingkah laku sosial yang terdapat dalam suatu masyarakat setempat (Toruan, Hamzah, & Sari, 2019). Didasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan subyek Ibu SMY dan NL, sebelum kegiatan dilaksanakan diperlukan adanya persiapan diklat dengan cara melakukan sosialisasi yang bertujuan agar masyarakat tahu tentang diklat yang akan dilaksanakan. Sosialisasi dilakukan dengan cara melakukan kunjungan langsung ke daerah yang memiliki potensi pada industri bordir dan *fashion* serta melakukan kunjungan langsung ke daerah yang telah menjalin kerja sama dengan Balai Diklat Industri Padang. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan dengan menggunakan media promosi seperti *web site*, instagram, facebook yang berisikan informasi terkait diklat yang dilaksanakan.

Kerjasama

Mardikanto & Poerwoko (2017) menyampaikan tujuan dari kemitraan, yaitu: 1) memfasilitasi pertukaran informasi; 2) pemantauan dan evaluasi pengujian dan demonstrasi; 3) identifikasi pelaksanaan kegiatan, masalah-masalah yang ditemui, serta alternatif pemecahan masalah yang diberikan; 4) mengembangkan pengujian dan demonstrasi untuk mengatasi masalah yang muncul; 5)

memfasilitasi kegiatan teknis; 6) mengembangkan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan subyek Ibu Hyt, NL dan Dn, hubungan yang dilakukan dengan pihak luar adalah berdasarkan tupoksi dari Balai Diklat Industri Padang dan *MoU* kerjasama. Kerjasama pada Diklat 3 in 1 Pembuatan Batik Tulis ini juga melibatkan *stakeholder* Balai Diklat Industri Padang yaitu Pemerintah Daerah. Dalam hal ini diwakili oleh Bupati/Walikota, Dinas Perindustrian, Dekranasda, Industri Kecil dan Menengah (IKM) bidang Bordir dan *fashion* serta Kelompok Usaha Bersama (KUB) bidang Bordir dan *fashion*. Kerjasama tersebut dituangkan ke bentuk Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Daerah, Dinas Perindustrian serta IKM dan KUB.

Kerjasama dilakukan dengan cara menghubungi dinas dari daerah yang ingin bekerjasama dan menandatangani *MoU* tersebut oleh pihak yang bersangkutan, seperti Kepala Balai Diklat Industri, Kepala Dinas bersangkutan dan diketahui oleh Wali Kota. Setelah itu, didapatkan peserta dari pihak bersangkutan dan kemudian Balai Diklat Industri Padang melakukan penyusunan jadwal. Pada tahun 2019, pelaksanaan diklat yang paling banyak diminati, yaitu Diklat 3 In 1 Pembuatan Batik Tulis. Dahulu kerjasama yang dilakukan hanya dengan KUB (Kelompok Usaha Bersama) kemudian meningkat ke pemerintah kabupaten dan kota, dan dulunya peserta hanya dari Sumatera Barat, tetapi untuk sekarang sudah hampir menyebar ke seluruh bagian pulau Sumatera. Daerah yang sudah melakukan kerjasama, seperti Palembang, Jambi, Bengkulu, Kep. Riau. Selain itu Balai Diklat Industri Padang juga akan melakukan penjangkauan di Medan dan Aceh. Jika nanti di seluruh Sumatera sudah tercover, barulah akan dilakukan lagi ekspansi ke daerah lain. Melalui kerjasama dengan pihak luar, peserta yang telah dilatih akan disertifikasi dan ditempatkan. Serta juga mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah. Perhatian tersebut diberikan dalam bentuk bantuan mesin, peralatan pelatihan tingkat lanjut dan lainnya.

Perekrutan Peserta

Rekrutmen adalah proses mendaftarkan anggota baru melalui proses seleksi dan pengangkatan guna menduduki peran tertentu yang terdapat pada sistem sosial dengan kategori pengelompokan yang meliputi suku, kedudukan sosial, kelahiran, dan sebagainya (Prasetya, Cahyo, & Maula, 2019; Yullyanti, 2009). Didasarkan hasil wawancara yang dilakukan subyek SMy, Dn, Untuk perekrutan peserta diklat, sebelum suatu pelatihan dilaksanakan, terlebih dahulu Balai Diklat Industri Padang menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, kabupaten atau kota, serta Kelompok Usaha Bersama (KUB), baik dari Provinsi Sumatera Barat maupun di luar Sumatera Barat. Setelah kerjasama dijalin barulah diklat bisa dilaksanakan, sesuai tema diklat yang bergerak di bidang bordir dan *fashion*. Pihak yang bekerjasama merupakan orang yang merekrut peserta diklat, baik diklat dilaksanakan di lembaga maupun di luar lembaga. Peserta pada diklat ini ditetapkan 70 orang peserta diklat yang mana peserta direkrut oleh daerah yang ingin melakukan pelatihan, kemudian mengajukan kepada Balai Diklat Industri Padang untuk pelaksanaan diklat. Peserta yang mengikuti diklat diberikan syarat-syarat sebelum mendaftar sebagai peserta diklat. Syarat peserta ialah usia 18-35 tahun. Baik laki-laki maupun perempuan, mereka mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti diklat. Selain itu, peserta yang mempunyai keterbatasan fisik disabilitas juga diberikan kesempatan mengikuti diklat, jadi tidak ada perbedaan dalam perekrutan peserta diklat, baik yang normal maupun yang disabilitas.

Penyusunan Program Diklat

Penetapan Kurikulum Diklat

Basri, (2015) menyatakan bahwa kurikulum merupakan seperangkat pengaturan dan rencana kegiatan diklat yang berisi tujuan, deskripsi dan sasaran diklat, daftar mata diklat dan bahan referensi, silabus, dan metode diklat yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengajaran. Dalam kegiatan diklat, kurikulum merupakan acuan bagi peserta, widyaiswara/fasilitator dan penyelenggara karena kurikulum memberikan gambaran mengenai hal yang berhubungan dengan kegiatan diklat (Bahrissalim & Fauzan, 2018; Nurhajati & Bachri, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu SMY, Dn, Kurikulum diklat mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Hal tersebut menggunakan SKKNI karena SKKNI merupakan acuan yang dipakai dalam diklat, baik itu acuan dalam pembuatan struktur lembaga, pelaksanaan uji kompetensi maupun SOP. Sebenarnya tidak hanya kurikulum yang mengacu pada SKKNI. Penetapan kurikulum batik tulis diambil dari SKKNI yang dikeluarkan tahun 2014. Balai Diklat Industri Padang memakai beberapa yang dari SKKNI sampai tahun 2019 ini. Kemudian setelah dilakukan relisensi, ada saran dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) untuk mengganti kurikulum dengan SKKNI yang baru, dan itu SKKNI 2018. Sejak saat itu kurikulum berubah dan mengikuti SKKNI yang baru, sebenarnya masih mirip, tetapi kompetensinya lebih banyak. Kurikulum ditetapkan berdasarkan spesialisasi kami. Spesialisasi Balai Diklat Industri Padang yaitu Bordir dan *Fashion*. Jadi sebelum melakukan penetapan, terlebih dahulu melihat kebutuhannya. Misalkan di Sumatera lebih banyak industri seperti apa, industri rumahan misalnya. Industrinya tersebut kebanyakan sulaman bordiran, itulah yang akan dijadikan skema kurikulumnya. Untuk tahun 2020 ini dari BPSDMI atau dari pusat disarankan untuk melebarkan sayap atau mengembangkan lagi kurikulum yang digunakan.

Penyusunan Modul Diklat

Modul menurut Prastowo, (2013) ialah komponen bahan ajar yang disusun secara sistematis yang di dalamnya terdapat perangkat pengalaman belajar yang didesain guna membantu peserta didik untuk memahami tujuan belajar secara spesifik. Modul pembelajaran setidaknya memiliki tujuan pengajaran, materi ajar, dan lembar evaluasi (Hidayat, 2017; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017; Sulfemi, 2018). Menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, (2008) untuk bisa menciptakan modul yang bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik maka modul tersebut harus memperhatikan: a) *Self instructional*, b) *Self Contained*, c) *Stand alone* (berdiri sendiri), d) Adaptif dan e) *User friendly*.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rf, Ibu SMY dan Dn, kriteria dalam penyusunan modul, yaitu *Self instructional*, maksudnya bahwa peserta mampu membelajarkan diri sendiri dan tidak tergantung pada orang lain. *Self contained*, maksudnya semua materi pengajaran dari satu standar kompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu modul secara utuh. *Adaptive*, maksudnya modul memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. *User friendly*, maksudnya modul memenuhi kaidah bersahabat/akrab dengan pemakainya, termasuk dalam artian modul tersebut mudah digunakan dan dipahami. Karakteristik pada modul pelatihan berbasis kompetensi di Balai Diklat Industri Padang ini terdiri dari: *pertama*, buku informasi yang berisi penjelasan langkah kerja yang harus dilakukan pada setiap elemen kompetensi serta informasi yang relevan dengan langkah kerja tersebut. *Kedua*, buku kerja, digunakan sebagai media penilaian formatid, yaitu media untuk memantau kemajuan kompetensi yang dimiliki peserta latihan selama proses pembelajaran. *Ketiga*, buku penilaian dibuat untuk menguji peserta pelatihan setelah selesai menempuh bagian informasi dan menyelesaikan bagian kerja secara komprehensif. Juga untuk modul, diminta kepada para pengajar yang mengajar batik tulis untuk memberikan atau menyusun modul mereka masing-masing yang saat ini mereka pakai. Setelah diselidiki lagi, terdapat banyak perbedaan antara beberapa pengajar. Kemudian Balai Diklat Industri Padang mengambil tindakan kalau modul yang digunakan untuk diklat disamakan seluruhnya sesuai dengan SKKNI. Jadi, siapapun yang mengajar, memakai modul dari Balai Diklat Industri Padang, demi kesesuaian dan kesamaan materi.

Pendidik

Mardikanto & Poerwoko (2017), dalam pendidikan nonformal pendidik dikenal dengan pelatih, fasilitator, instruktur, tutor, widyaiswara dan pamong belajar. Pendamping pada kegiatan pemberdayaan masyarakat di sini adalah seseorang yang menjembatani kearah kemajuan atau dapat disebut sebagai *agent of change* (agen perubahan) bagi masyarakat (Pamungkas, 2016, 2017; Pamungkas, Sunarti, & Wahyudi, 2018). Pendamping masyarakat dapat juga disebut dengan fasilitator pemberdayaan masyarakat. Seorang fasilitator harus dapat mengetahui apa kelebihan dan kekurangan serta potensi yang ada pada masyarakat (Pamungkas, 2019a; Solfema, 2017; Solfema, Wahid, & Pamungkas, 2019).

Menurut Notaatmodjo dalam Basri, (2015) instruktur ialah seorang pendidik yang perlu mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan khususnya kepada pekerjaan yang ditekuninya. Instruktur diminta untuk selalu tampil secara kreatif dalam meningkatkan kemampuannya supaya bisa menciptakan kegiatan belajar sesuai dengan harapan masyarakat. Mengenai sikap instruktur bahwasanya jika ia bersikap secara bersahabat dan rileks, membuka pertemuan dengan tersenyum, informal dan hangat maka anak didik akan merasa lebih santai dan senang dalam belajar serta akan menciptakan kegiatan yang berpartisipasi (Solfema, 2013, 2017; Solfema & Wahid, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan subyek Wo, tenaga pengajar Diklat 3 in 1 Pembuatan Batik Tulis ini memakai tenaga yang berasal dari Balai Diklat Industri Padang. Tenaga pengajar yang digunakan, yaitu orang-orang yang sudah berkompeten dan yang sudah menjadi pegawai di Balai Diklat Industri Padang. Untuk pengajar, Balai Diklat Industri Padang mempunyai pengajar dari akademisi, praktisi maupun pengusaha, namun di Balai Diklat Industri Padang ini, lebih banyak menggunakan praktisi. Karena mereka yang benar-benar tau cara mengajar atau mendiklatkan peserta diklat, mereka tidak hanya sebagai pelatih teori, tetapi juga pelatih praktek.

Penyusunan Skema Uji Kompetensi

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjamin pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja, pasal 18 menetapkan bahwa tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja berupa sertifikasi kompetensi kerja. Menurut Pedoman BNSP 306 Tahun 2014 sertifikasi kompetensi kerja bertujuan untuk: (1) memberikan stimulus/mempercepat pengakuan industri dan sektor terhadap tenaga kerja bersertifikat kompetensi, (2) memfasilitasi calon tenaga kerja untuk mendapatkan sertifikat kompetensi, (3) mengoptimalkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi oleh LSP, (4) memfasilitasi kerjasama LSP dengan dunia usaha/dunia industri dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga kerja bersertifikat kompetensi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa subyek Hyt, Rf dan SMY, penyusunan skema uji kompetensi melibatkan *Stakeholder* dari Balai Diklat Industri Padang, yaitu praktisi dan akademisi. Baik instruktur, widyaiswara maupun pengurus LSP-P1 (Pihak Pertama), penyusunan skema tersebut menjadi kunci pelaksanaan uji kompetensi oleh LSP-P1 Balai Diklat Industri Padang. Pada penetapan kompetensi terdapat item-item kompetensi yang ada di SKKNI, dan sudah tertera kompeten-kompetennya. Pelaksanaan uji kompetensi ini nanti yang menguji peserta diklat itu adalah LSP-P1. Masing-masing peserta diuji untuk dilihat apakah mereka kompeten atau tidak. Penilaian kompetensi itu ada dua yaitu kompeten dan tidak kompeten. Tujuan penetapan kompetensi ini agar nanti peserta dapat bekerja dan keterampilannya mereka diakui. Diluar negeri sudah ditanda tangani oleh BNSP. Serta sertifikat kompetensi tersebut dapat menguatkan syarat-syarat dalam memperoleh pekerjaan. Kompetensi memiliki dua penilaian, yaitu kompeten dan tidak kompeten. Jika peserta kompeten, maka akan mendapatkan sertifikat dari BNSP, dengan masa berlaku sertifikat adalah 3 bulan. Jika peserta tidak lulus uji kompetensi, mereka bisa mengikuti atau uji kompetensi dengan diklat yang sama. Untuk mengikuti uji ulang kompetensi, peserta dikenakan biaya sebesar 150 ribu yang digunakan untuk pembelian bahan praktek uji kompetensi serta digunakan untuk pembayaran honor praktisinya. Dan setelah lulus uji kompetensi akan ada penempatannya.

Penyusunan Jadwal Diklat

Kategori dalam penjadwalan kegiatan dikemukakan oleh Ginting (2009), dikategorikan menjadi dua bentuk yaitu: a) Penjadwalan maju (*forward scheduling*) yaitu menjadwalkan kegiatan dimulai dari tanggal penerimaan secara maju dan akan terjadi kemungkinan untuk menyediakan bahan baku sampai proses dilaksanakan. Metode ini mempunyai keuntungan, yaitu jadwal bisa disusun secara SPT (*Short Processing Time*) sehingga diperoleh suatu jadwal dengan *flowtime* yang minimum. b) Penjadwalan mundur (*backward scheduling*) yaitu teknik dalam menjadwalkan kegiatan dimulai dari waktu operasi berakhhir. Kelebihan metode ini ialah bisa mengurangi barang setengah jadi (*work in process*).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subyek Wo dan N1, pada awal tahun anggaran, Balai Diklat Industri Padang telah menyiapkan daftar nama-nama diklat yang akan dilaksanakan pada tahun yang 2019, lengkap dengan jadwal pelaksanaannya sebagai panduan bagi calon peserta maupun penyelenggara dalam pelaksanaan diklat. Jadwal diklat masih dilaksanakan dalam waktu 18 hari. Untuk kedepannya akan dilakukan penyusunan kurikulum, pada tahun 2020, jadwal akan disesuaikan lagi.

Pelaksanaan Pengembangan Program Diklat

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Menurut Daryanto, (2006) fasilitas meliputi semua komponen sarana dan prasarana belajar, sarana belajar ialah berupa alat yang langsung dipergakan untuk mengapai tujuan pendidikan. Fasilitas belajar yang diberika oleh lembaga ada berupa alat tulis kantor (ATK), menurut Wursanto, (2006) menyatakan alat tulis kantor berarti barang yang digunakan dalam pengerjaan suatu pekerjaan tulis dan menulis yang mencakup kertas, penggaris, penghapus, buku-buku, pensil dan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subyek Wo, pendistribusian dilakukan untuk menyediakan bahan dan alat tulis untuk peserta diklat demi kelangsungan belajar peserta pelatihan. Tujuan peserta diberi alat tulis supaya peserta merangkum apa yang telah dilakukan selama proses pelatihan setelah peserta merangku, nantinya akan dikumpulkan ke lembaga sebagai bagian dari penilaian. Pemberian alat tulis kantor semua pembiayaannya dibiayai oleh APBN. Untuk akomodasi, akan diberikan apabila diklat dilaksanakan di Balai Diklat Industri Padang, jika dilaksanakan diluar lembaga tidak diberikan akomodasi.

Metode Diklat

Metode menurut Basri, (2015) berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang diartikan sebagai cara atau jalan yang ditempuh. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan metode ialah cara kerja yang tersistem untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan tertentu. Menurut Cherrington dalam Basri, (2015) metode dalam pelatihan dibagi menjadi dua yaitu, *on the job training* dan *of the job training*. *On the job training* lebih banyak digunakan dibanding dengan model *off the job training*. Hal ini disebabkan karena metode *on the job training* lebih fokus pada peningkatan produktivitas secara cepat. Menurut Gary Dessler dalam Basri, (2015) *on the job training* merupakan metode yang sudah sangat populer alam dunia pelatihan, *on the job training* secara defenisi ialah melatih seseorang untuk mempelajari pekerjaan sambil mengerjakannya. Sedang *off the job training* ialah teknik pelatihan yang dilaksanakan diluar waktu kerja, dan berlangsung di lokasi yang jauh dari tempat kerja, agar perhatian peserta lebih fokus.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subyek Ibu Hyt, pada tahun 2019 ini metode pelaksanaan diklat di Balai Diklat Industri Padang sudah menggunakan metode model pelaksanaan *Off The Job Training* dan *On The Job Training*, walaupun persentasenya lebih banyak menggunakan model *Off The Job Training*. Kemudian sejak tahun 2018 sudah dilaksanakan review terhadap kurikulum, yang telah berjalan selama ini untuk melihat apakah kurikulum yang ada masih relevan dengan perkembangan zaman, selain itu di Balai Diklat Industri Padang mencoba mengembangkan pola pelatihan lebih besar kearah *On The Job Training* dengan memanfaatkan *Teaching Factory* dan *Workshop* yang ada maupun dengan yang bekerja sama dengan pihak industri atau KUB serta sentra yang telah memenuhi kriteria sarana prasarana yang dibutuhkan. Diperoleh juga hasil wawancara peneliti dengan subyek Nrc, metode yang digunakan bervariasi, seperti ceramah, diskusi, pemutaran video, praktek dan lainnya. Sebelum kegiatan pelatihan dilaksanakan, peserta dianjurkan untuk mengisi *pre test* sebagai evaluasi awal. Setelah materi diklat selesai dilakukan, dilanjutkan dengan *post test* sebagai evaluasi akhir. Nilai *pre test* dan *post test* tersebut dibandingkan untuk mengetahui tingkat penyerapan materi masing-masing mata diklat.

Pelaksanaan Uji Kompetensi

Menurut Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2015, uji kompetensi adalah bentuk metode evaluasi kompetensi yang diyakini sebagai metode yang paling memberikan kepastian pencapaian kompetensi, karena memberikan kesempatan untuk mengakses

bukti-bukti langsung, tidak langsung, dan tambahan dan juga memungkinkan untuk mengakses 5 (lima) dimensi kompetensi (*task skills, task management skills, contingency skills, job/role environment skills, dan transfer skills*) ditambah *skills for employability*). Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subyek Rf, hasil dari pelaksanaan uji kompetensi akan dituangkan dalam Berita Acara Uji Kompetensi (BAP) yang ditetapkan melalui sidang pleno LSP Balai Diklat Industri Padang. Peserta yang telah memenuhi standar kompetensi disebut kompeten dan akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua LSP Balai Diklat Industri Padang. Sedangkan sertifikat kompetensi akan diterbitkan setelah belangkoo sertifikat diterima dari BNSP.

Evaluasi Pengembangan Program

Sutarto (2013) menjelaskan bahwa evaluasi (penilaian) tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran pelatihan, hal ini karena peran dari pendidik sebagai evaluator (penilai), hal ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan peserta dan efektivitasnya dalam pelatihan. Tahapan dalam evaluasi ada tiga tahap yaitu: 1) evaluasi awal, evaluasi yang dilakukan sebelum penyusunan dalam suatu program pelatihan dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta melalui kegiatan identifikasi kebutuhan, verifikasi dan analisis kebutuhan; 2) evaluasi proses, penilaian ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian setiap langkah program pembelajaran pelatihan dan tingkat keberhasilan yang akan dicapai dalam melaksanakan program; 3) evaluasi hasil, penilaian ini dilakukan setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan baik itu dilihat dari aspek pengetahuan, sikap, keterampilan setelah mengikuti kegiatan pelatihan. Sedangkan dalam kegiatan Diklat 3 in 1 Pembuatan Batik Tulis hanya menggunakan dua macam kegiatan evaluasi yaitu evaluasi awal dan evaluasi akhir untuk lembaga dan pengajar. Namun sering kali yang menjadi perhatian adalah evaluasi akhirlnya saja.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subyek Wd dan SMy, evaluasi dilakukan terhadap pengajar, penyelenggara diklat dan pelaksana diklat. aspek yang dinilai, pertama untuk evaluasi pengajar yaitu (pencapaian tujuan instruksional, sistematika dan kemampuan menyajikan, ketepatan waktu kehadiran dan menyajikan, cara menjawab pertanyaan dari peserta, penggunaan sarana dan metode diklat, sikap dan perilaku, penggunaan bahasa, pemberian motivasi kepada peserta, penguasaan materi, kerapian berpakaian pengajar, dan kerjasama antara widyaiswara/tim. Kedua, *evaluasi penyelenggara* yaitu (efektivitas penyelenggaraan, ketersediaan dan kesiapan sarana diklat, kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana, kebersihan kelas, asrama, toilet, kafetaria, dan fasilitas lain sebagainya, ketersediaan dan kelengkapan bahan diklat, pelayanan terhadap peserta dan widyaiswara, dan administrasi diklat. Tujuan dari penilaian ini yaitu untuk melihat kinerja lembaga, pengajar, serta panitia penyelenggara. Evaluasi tersebut dilakukan diakhir pelatihan demi memperbaiki kinerja lembaga. Balai Diklat Industri Padang telah menyelenggarakan SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah), yaitu setiap kegiatan harus dilakukan evaluasi untuk melihat kendala atau hambatannya, dan apa tindak lanjut yang dilakukan. Setiap kegiatan selalu dilakukan SPIP.

KESIMPULAN

Didasarkan uraian hasil dan pembahasan yang dilakukan maka kesimpulannya, yaitu: 1) Kegiatan Diklat 3 In 1 Pembuatan Batik Tulis dilakukan pengembangan dengan maksud untuk memberi keterampilan bagi masyarakat demi mencapai kecakapan hidup. Kegiatan pengembangan diklat ini sudah dilakukan dengan baik, sebagaimana Balai Diklat Industri Padang melakukan beberapa tahap dalam kegiatan pengembangan, diantaranya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan. Tahapan pertama perencanaan meliputi: (a) penentuan sasaran, yang terbagi menjadi sosialisasi, kerjasama, dan peserta. (b) penyusunan program diklat, yang terbagi menjadi penetapan kurikulum, penyusunan modul diklat, pendidik, penyusunan skema uji kompetensi, dan penyusunan jadwal diklat; 2) Tahap pelaksanaan pengembangan program Diklat 3 In 1 Pembuatan Batik Tulis juga sudah dilaksanakan dengan baik, seperti pada tahapan yang meliputi: (a) pendistribusian peralatan belajar peserta, (b) metode diklat yang digunakan, (c) suasana diklat, (d) dan pelaksanaan uji kompetensi; dan 3 Tahap evaluasi pengembangan program Diklat 3 In 1 Pembuatan Batik Tulis

dilakukan dengan dua tahapan yaitu pre-test dan post-test, maksudnya yaitu evaluasi awal dan evaluasi akhir. Dengan adanya kegiatan pengembangan program Diklat 3 In 1 Pembuatan Batik Tulis ini, juga dapat melestarikan budaya bangsa dan juga memperlebar sumber pencaharian dan sumber usaha baru di bidang bordir dan fashion.

DAFTAR RUJUKAN

- Bahrissalim, B., & Fauzan, F. (2018). Evaluasi Kurikulum Pelatihan dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru PAI di Balai Diklat Keagamaan Jakarta. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 13(1), 25–52. <https://doi.org/10.21043/edukasia.v13i1.2779>
- Basri, H. (2015). *Paradigma Baru Sistem Pembelajaran*. Bandung: Pustaka Setia.
- Daryanto. (2006). *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. (2008). *Seri Bahan Bimbingan Teknis Implementasi KTSP SMK (Teknik Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Silabus Sekolah Menengah Kejuruan)*. Jakarta: Dekdiknas.
- Ginting, R. (2009). *Perancangan Produk*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hidayat, S. (2017). Pendidikan Berbasis Media dan Modul. *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, 9(1), 181–218. Retrieved from <http://e-jurnal.stainsorong.ac.id/index.php/Al-Riwayah/article/download/132/128/>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Modul Pelatihan Fasilitasi Melatih*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Retrieved from https://pusdiklat.kemdikbud.go.id/file/e-publikasi/02_BAHAN_AJAR/Modul_Pelatihan_Teknis/03.15_Pelatihan_Teknik_Fasilitasi_Melatih_bagi_Pamong_Belajar/03.15_Modul_Pelatihan_Teknik_Fasilitasi_Melatih_bagi_Pamong_Belajar.pdf
- Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2015.
- Mardikanto, T., & Poerwoko, S. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif (ketigapulu)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhajati, W. A., & Bachri, B. S. (2018). Pengembangan Kurikulum Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) Berbasis Kompetensi dalam Membangun Profesionalisme dan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS). *Jurnal Pendidikan (Teori Dan Praktik)*, 2(2), 156. <https://doi.org/10.26740/jp.v2n2.p156-164>
- Pamungkas, A. H. (2014). *Pengelolaan Pelatihan dalam Organisasi (Tinjauan Teori Pembelajaran Orang Dewasa)* (Makalah). Padang. Retrieved from http://www.sumbarprov.go.id/images/1450027790-2_alim_harun.pdf
- Pamungkas, A. H. (2016). *Kesukarelaan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat*. Malang: NAMS.
- Pamungkas, A. H. (2017). Rancangan Pengembangan Program Pendidikan Kewirausahaan Berbasis Pendidikan Luar Sekolah. In *Seminar Nasional Pendidikan Nonformal FKIP Universitas Bengkulu* (Vol. 1, pp. 199–206). Bengkulu: Universitas Bengkulu. Retrieved from http://repository.unib.ac.id/11756/1/18_Alim_Harun_Pamungkas_RANCANGAN_PENGEMBANGAN_PROGRAM_PENDIDIKAN_KEWIRAUSAHAAN_BERBASIS_PENDIDIKAN_LUAR_SEKOLAH.pdf
- Pamungkas, A. H. (2019a). Management of Human Resources in Community Learning Center to Achieve the Objectives of Social Development Goals. *Padang International Conference on Educational Management And Administration (PICEMA 2018)*, 337(Picema 2018), 233–235. <https://doi.org/10.2991/picema-18.2019.48>
- Pamungkas, A. H. (2019b). The Approaches Used by Community Learning Center (PKBM) to Achieve Sustainable Development Goals in Solok Selatan West Sumatra Province Indonesia. In A. H. Pamungkas, S. Syuraini, & W. A. Wahyudi (Eds.), *1st Non Formal Education International Conference (NFEIC 2018)* (Vol. 293, pp. 14–18). Paris: Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/nfeic-18.2019.3>
- Pamungkas, A. H., Sunarti, V., & Wahyudi, W. A. (2018). Peran PKBM dalam Peningkatan

- Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Hidup Masyarakat Sesuai Target SDGs. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(3), 301–307. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i3.101240>
- Prasetya, A. I., Cahyo, A. D., & Maula, A. (2019). Metode dan Prosedur Pelaksanaan Rekrutmen Seleksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. *Competence: Journal of Management Studies*, 12(2), 90–107. <https://doi.org/10.21107/kompetensi.v12i2.4952>
- Prastowo, A. (2013). *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. Yogyakarta: Diva Press.
- Prastowo, A. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pub. L. No. 20 (2003). Indonesia. Retrieved from <https://www.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/10/UU20-2003-Sisdiknas.pdf>
- Solfema, S. (2013). *Andragogi Konsep dan Penerapannya*. Malang: Wineka Cipta.
- Solfema, S. (2017). Adversity Intelligence as a Contributing Factor of Tutor's Performance. *European Journal of Education Studies*, 3(11), 840–847. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1134472>
- Solfema, S., & Wahid, S. (2018). Job Satisfaction as a Contributing Factor of Educators Performances. *European Journal of Education Studies*, 4(8). <https://doi.org/10.46827/ejes.v0i0.1703>
- Solfema, S., Wahid, S., & Pamungkas, A. H. (2019). The Contribution of Self Efficacy, Entrepreneurship Attitude, and Achievement Motivation to Work Readiness of Participants of Life Skill Education. *Journal of Nonformal Education*, 5(2), 125–131. <https://doi.org/10.15294/jne.v5i2.20205>
- Sulfemi, W. B. (2018). *Modul Manajemen Pendidikan Nonformal*. Bogor. Retrieved from <https://osf.io/p9bez/download/?format=pdf>
- Sutarto, J. (2013). *Manajemen Pelatihan*. Yogyakarta: Cv Budi Utama.
- Toruan, R. R. M. L., Hamzah, R. E., & Sari, A. P. (2019). Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan Humas MPR RI Melalui Kegiatan Sosial Budaya. *DIALEKTIKA KOMUNIKA: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Pembangunan Daerah*, 7(2), 1–11. Retrieved from <http://ejournal.unis.ac.id/index.php/DK/article/view/355>
- Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 Ayat 1.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Wursanto, I. (2006). *Kompetensi Sekretaris Profesional*. Yogyakarta: Andi.
- Yullyanti, E. (2009). Analisis Proses Rekrutmen dan Seleksi pada Kinerja Pegawai. *Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 16(3), 131–139.